

ANALISIS PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MELAWI

Hermansyah Putra Pane¹; Muhammad Fahmi²; Rusliyawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Program Studi Akutansi
Jln. Prof. Dr. H.Hadari Nawawi / Jendral Ahmad Yani, Pontianak - Kalimantan Barat (78124)
E-mail : hermansyah160603@gmail.com

diterima: 16/7/2024; direvisi: 17/7/2024; diterbitkan: 26/9/2024

Abstract: The aim of the research is to analyze the Regional Disaster Management Agency (BPBD), which is a regional government agency that has the task of implementing disaster management at the provincial, district or city level, in accordance with the rules set by the National Disaster Management Agency (BNPB). This research method uses qualitative research methods by collecting data from direct interviews and field observations. The results of this research show that disasters that occur during 2023 are dominated by floods and fires, but the most frequent ones are floods. BPBD Melawi Regency has used disaster management funds as best as possible, but is experiencing problems in carrying out its activities due to the very limited budget. The implications of the condition of disaster management funds at BPBD Melawi Regency in 2024 have improved from the previous year. This has had a positive impact on the Melawi Regency BPBD to carry out its comprehensive disaster management program from the pre-disaster, emergency response and post-disaster stages.

Keywords: Analysis of Fund Use, Disaster Management Funds, Regional Disaster Management Agency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai 17.000 pulau dan secara geografis terletak diantara empat lempeng tektonik. Letak geografis Indonesia memungkinkan terjadinya bencana seperti gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor dan banjir (Putra & Hakim, 2016). Data yang disampaikan BNPB pada 2023 jumlah bencana yang terjadi di Indonesia sebanyak 5.400 bencana. Kondisi ini mengakibatkan 275 orang meninggal, 33 hilang, 5.795 luka-luka dan 8.491.288 menderita dan mengungsi. Selain itu, kerusakan fisik sebanyak 47.214 unit rumah, 680 unit fasilitas Pendidikan, 506 unit fasilitas peribadatan dan 105 fasilitas kesehatan (Aini et al., 2024). BPBD merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan penanggulangan atau penanganan bencana pada tingkat provinsi, kabupaten

atau kota, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan sebuah peraturan yang dikeluarkan BNPB RI terkait Peraturan Kepala (Perka) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD di Provinsi dan Kabupaten untuk dapat membantu dalam penanggulangan dan penanganan bencana pada daerah tersebut.

Dana penanggulangan bencana terbagi menjadi tiga jenis dan memiliki fungsi yang berbeda dan waktu penggunaan yang berbeda pula (Harijoko et al., 2021). Sedangkan, di dalam APBN mempunyai Dana Kontijensi yang ditujukan sebagai tindakan kesiapsiagaan pada tahap prabencana (Dianty, 2022). Kemudian Dana siap pakai yang dialokasikan dari APBN dan ditempatkan pada anggaran BNPB untuk kegiatan tanggap darurat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyiapkan DSP sendiri yang sumber dananya berasal dari APBD yang harus selalu tersedia dalam situasi

darurat. APBN juga menyediakan dana bantuan sosial seperti hibah untuk kegiatan pascabencana. Penanggulangan atau penanganan bencana wajib dilakukan secara cepat dan efektif, dengan memperhatikan tata kelola dan akuntabilitas (Dianty, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pembiayaan dan Pengelolaan Instrumen Bencana, Pasal 32 di menyatakan bahwa: 'Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana (Arham & Firmansyah, 2019).

Beberapa perbedaan dari bencana alam yang menjadi fenomena tahunan bahkan menjadi sebuah langganan di daerah-daerah tertentu. Dalam buku Hermon, (2015) menjelaskan bahwa bencana alam terjadi dikarenakan Indonesia terletak pada tiga pertemuan lempeng yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke selatan, dan lempeng pasifik yang bergerak ke timur. Sedangkan dalam penelitian Laveda et al., (2024) mengungkapkan bahwa salah satu faktor bencana alam terjadi lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat. Maka penting kesiapsiagaan masyarakat dalam semua kondisi cuaca di Indonesia. Ditambah Pudjiastuti, (2019) mengatakan bahwa rata-rata masyarakat mengetahui tanda-tanda dan peringatan atas adanya tanggap darurat di perkotaan (11,35%), dan pedesaan (8,08%).

Sejalan dengan itu, sepanjang tahun 2023 Kabupaten Melawi cukup sering mengalami bencana seperti banjir dan kebakaran, namun yang sering terjadi dominan adalah banjir (Muryanti & Rokhiman, 2017). Banjir timbul diakibatkan curah hujan yang tinggi tidak diimbangi dengan daerah resapan air yang memadai sehingga cukup sering terjadi banjir. Kabupaten Melawi

sebagian besar wilayah hutan sudah beralih fungsi menjadi daerah perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Sehingga hutan kekurangan keuatannya dalam fungsi penyerapan air dan mengakibatkan terjadinya banjir. Selain itu, kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam ataupun kelalaian manusia. Masyarakat sekitar masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan karena hal ini merupakan bagian dari budaya masyarakat sekitar. Sering terjadi kebakaran hutan yang disebabkan karena tidak terkendalinya api yang berasal dari pembakaran lahan masyarakat (Suryani, 2012).

Kesadaran masyarakat yang terjadi untuk meninggalkan budaya bakar lahan sangat diperlukan agar kedepannya tidak menimbulkan kebakaran hutan secara masif maupun bertujuan mengurangi potensi resiko terjadinya bencana lain yaitu banjir dan tanah longsor yang diakibatkan oleh gundulnya hutan (Octavianti & Watrin, 2020). Bencana yang terjadi pada Kabupaten Melawi cukup sulit ditangani BPBD terutama daerah yang cukup jauh dari kota. BPBD terkendala pada akses jalan yang mengakibatkan terbatasnya mobilitas serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk menjangkau daerah terdampak bencana. Sehingga, BPBD harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak untuk menangani bencana yang terjadi (Sadat, 2019).

Permasalahan yang terjadi di Melawi penting untuk di analisa apakah penggunaan dana penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Melawi telah digunakan secara efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2008. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penggunaan Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan selama periode Tahun 2023. Dana penanggulangan bencana tersebut mencakup kegiatan pelayanan pencegahan bencana, pelayanan penyelamatan maupun

evakuasi korban bencana, dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan penanggulangan bencana. Analisis lebih ditekankan untuk melihat apakah dana penanggulangan bencana sudah digunakan secara tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Buku Intermediate Accounting, Kieso, Weygandt, dan Warfield dalam Leiwakabessy, (2020) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan (Pelleng et al., 2023; PUTRI, 2022). Sedangkan, Thomas Sumarsan dalam buku Perpajakan Indonesia, Akuntansi diartikan seni dalam proses pengumpulan, pengidentifikasi, pengklasifikasikan dan pencatatan transaksi maupun peristiwa yang berkaitan dengan keuangan, untuk memberikan informasi berbentuk laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Natasya, 2021). Dipertegas Purnairawan dan Sastroatmodjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi mengungkapkan bahwa Akuntansi dapat ditafsirkan sebagai proses mencatat, mengklasifikasikan dan merangkum transaksi keuangan yang diatur secara sistematis dan kronologis, yang disajikan sebagai langkah penentu dalam laporan keuangan (Taufiq & Silaturahmi, 2022). Berdasarkan beberapa definisi akuntansi menurut para ahli tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan, yaitu pengumpulan, pengidentifikasi, pengklasifikasian serta pencatatan transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan keuangan, dan melaporkan informasi keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) merupakan instansi pemerintahan daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan

penanggulangan atau penanganan bencana pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. BNPB RI telah mengeluarkan Peraturan Kepala No. 3 Tahun 2008 yang memberikan pedoman dalam pembentukan BPBD di provinsi dan kabupaten dengan tujuan untuk mendukung penanggulangan bencana yang ada di daerah. Hal ini dipertegas dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 4, Penanggulangan bencana memiliki tujuan untuk: (1) Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; (2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; (3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; (4) Menghargai budaya lokal; (5) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; (6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan (7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tahap prabencana merupakan tahapan sebelum terjadinya bencana, prabencana diisi oleh kegiatan seperti pecegahan bencana untuk meminimalisir atau menghilangkan resiko terjadinya bencana (Ulum, 2014). Mitigasi atau berbagai upaya seperti pembangunan fisik untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana dengan menyediakan segala yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana, meliputi alat, kendaraan serta gedung atau bangunan (Nurillah et al., 2022).

Tanggap darurat merupakan kegiatan yang dilakukan ketika bencana terjadi, kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi serta menangani dampak buruk yang timbul akibat bencana. Kegiatan tanggap darurat meliputi penyelamatan atau pengevakuasi korban maupun harta benda, memberikan pengungsian, perlindungan dan kebutuhan

dasar serta pemulihan kembali sarana dan prasarana yang rusak atau hancur akibat dari terjadinya bencana (Rijanta et al., 2018). Adapun bantuan darurat bencana yaitu bantuan yang diberikan pada saat keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pasca Bencana merupakan keadaan setelah terjadinya bencana meliputi pemulihan, pembangunan ulang atau rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak atau hancur akibat bencana. Rehabilitasi yang merupakan kegiatan perbaikan pelayanan publik dalam masyarakat yang hancur atau rusak oleh bencana. Rehabilitasi akan membantu proses pemulihan kondisi masyarakat maupun lingkungan hidup yang terdampak oleh bencana (Rijanta et al., 2018).

Mengatasi kondisi tersebut dalam penanggulangan bencana penggunaan dana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008, Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (Dianty, 2022; Harijoko et al., 2021). Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tugas pokok dari Badan Penanggungjawaban Bencana Daerah menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 pasal 21 mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diperhatikan agar kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara tepat.

Penanggulangan bencana memiliki tiga jenis dana antara lain dana kontijensi, Dana Siap Pakai (DSP) dan dana sosial yang berpola hibah (Dianty, 2022). Dana kontijensi merupakan dana

yang diperuntukkan dalam upaya kesiapsiagaan pada masa prabencana. Dana siap pakai atau lebih dikenal sebagai DSP merupakan dana yang digunakan ketika situasi atau tahap keadaan darurat bencana. Dana bantuan sosial yang berpola hibah merupakan dana yang diperuntukkan ketika tahap pascabencana (Rivani, 2019). Sumber dana utama BPBD adalah APBD namun ketika bencana sudah pada level darurat bencana maka BNPB membantu BPBD dengan memberikan DSP yang bersumber dari APBN agar BPBD dapat menanggulangi bencana secara efektif. Status tanggap darurat memerlukan surat pernyataan bahwa bencana sudah memasuki tanggap darurat yang dinyatakan oleh kepala daerah bupati atau gubernur (Paripurno, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian kualitatif, karena uji yang dilakukan melalui sampling data dengan teori yang sudah ada untuk menganalisis suatu data. Menurut Abdussamad (2021) Penelitian kualitatif memiliki sifat benar adanya dan terjadi dalam kehidupan secara natural atau bersifat alami, sehingga tidak bisa melalui uji laboratorium, melainkan langsung dilapangan (Abdussamad & Sik, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan BPBD di Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan data premier dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan kegiatan utamanya BPBD Kabupaten Melawi menggunakan APBD sebagai sumber anggaran utamanya, namun dalam kondisi tanggap darurat dalam menanggulangi bencana BNPB membantu memberikan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBD yang bersumber dari APBN. DSP digunakan saat tanggap darurat yang mengharuskan ketersediaan dana secara

cepat dengan syarat kepala daerah memberikan surat pernyataan keadaan tanggap darurat, kepala daerah yang dimaksud yaitu bupati ataupun gubernur. Selain itu, selama menanggulangi bencana BPBD umumnya mendapatkan bantuan logistik dari pihak luar seperti perusahaan dan lainnya.

Kegiatan dilakukan dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan prabencana, tanggap darurat, pasca bencana. Kegiatan prabencana yang dimaksud adalah kegiatan mitigasi bencana berupa sosialisasi atau penyuluhan ke desa – desa yang terkena bencana maupun yang berpotensi terkena bencana kedepannya. Kegiatan tanggap darurat dilakukan ketika bencana sedang terjadi. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah evakuasi dan penyelamatan. Kegiatan tanggap darurat ketika banjir berupa evakuasi warga yang terjebak banjir, pemberian bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga yang terdampak banjir. Kegiatan tanggap darurat ketika longsor yaitu membantu untuk evakuasi ruas jalan yang terputus akibat dari longsoran tanah maupun pohon tumbang dan kegiatan tanggap darurat ketika kebakaran yaitu membantu evakuasi warga maupun harta benda yang mungkin terdampak oleh kebakaran yang timbul.

Kendala yang muncul ketika menjalankan kegiatan penanggulangan atau penanganan bencana terutama ketika tanggap darurat bencana banjir adalah mobilitas yang terkendala karena akses jalan yang sulit. Beberapa kejadian mengharuskan menempuh jalur air untuk menjangkau daerah yang terdampak banjir. Selain akses yang menghambat mobilitas, kurangnya sarana prasarana juga menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan tanggap darurat ketika banjir. Seperti kurangnya perahu karet, perahu mesin dan lainnya. Untuk mengantisipasi masalah yang sama muncul di masa mendatang, BPBD Kab. Melawi sudah memiliki tambahan perahu karet tak

bermesin dan bermesin untuk menghadapi bencana banjir dimasa mendatang.

Selama tahun 2023 BPBD Kabupaten Melawi melaksanakan Penanggulangan Bencana dengan beberapa program yaitu Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran. Adapun kegiatannya yaitu Pemadaman serta Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian anggaran sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Pemadaman serta Pengendalian Kebakaran 2023 BPBD Kabupaten Melawi

Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
75.360.990,0 0	75.138.440,0 0	222.550,0 0	99,7 0

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan dalam menjalankan kegiatan tersebut, keperluan yang dimaksud seperti Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk kendaraan yang digunakan selama kegiatan, Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan, maupun pembayaran Honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana. Anggaran sudah terealisasi secara menyeluruh dengan tingkat realisasi sebesar 99,70%. Dalam menjalankan program Penanggulangan Bencana kegiatan Pascabencana, BPBD Kabupaten Melawi dengan rincian anggaran sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pascabencana

Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
400.256.552, 00	393.953.388, 00	6.303.164, 00	98,4 3

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Anggaran digunakan untuk segala kegiatan yang dilakukan setelah bencana, termasuk penyediaan alat/bahan yang diperlukan pada saat pascabencana maupun jasa yang digunakan untuk membantu

terlaksananya kegiatan dengan baik. Pada tahun 2023 bencana banjir pada Kabupaten Melawi termasuk dalam kondisi tanggap darurat sehingga untuk penanggulangannya dibantu oleh BNPB berupa DSP maupun Logistik. Selain itu terdapat juga bantuan yang diberikan oleh PT maupun CV dalam rangka penanganan darurat bencana yang diterima oleh BPBD Kabupaten Melawi berupa bantuan logistik dengan total nilai sebesar Rp. 2.679.683.000. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan untuk membantu kegiatan operasional maupun mobilitas seperti; Perahu karet LCR, Mesin perahu 40 HP, Pompa Alkon 18 HP, Alat penjernih air dan sebagainya. Selain itu terdapat bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti, tenda pengungsian 6x12m, tenda keluarga (dome) 4,5 x 4,5 meter, makanan siap saji, selimut, matras, paket sembako dan lainnya. rincian dana siap pakai yang digunakan untuk belanja operasional penanganan banjir sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Belanja Operasional Penanganan Banjir

Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
250.000.00	250.000.00	-	100,0
0	0	0	0

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung, kegiatan prabencana yang umumnya diisi oleh kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan selama 2023 dikarenakan dana yang sangat terbatas sehingga prioritas utama adalah untuk menangani bencana karena selama 2023 cukup sering terjadi bencana banjir. Terbatasnya anggaran adalah salah satu kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Melawi. Hal ini berpengaruh kepada kegiatan penanggulangan bencana sehingga BPBD Kabupaten Melawi harus sangat teliti agar anggaran yang dikeluarkan dapat digunakan secara efektif dan tepat guna.

Ketika bencana sudah memasuki tahap darurat bencana level provinsi maka BNPB akan memberikan DSP (Dana Siap Pakai) untuk membantu BPBD dalam menangani bencana.

Hal ini didukung Lasaiba, (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penanganan bencana, seperti banjir sangat penting untuk terus didorong dan dimaksimalkan penanganannya di daerah perkotaan. Mempertimbangkan masih banyak daerah yang masuk kategori rendah secara geografis. Senada dengan Hardiyanto & Pulungan, (2019) ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menangani bencana alam banjir, BPBD harus sering melakukan komunikasi aktif kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai dan penyuluhan ke masyarakat juga sangat penting dilakukan untuk edukasi publik. Namun berbeda di kota Bogor dengan Arisandy et al., (2024) penanganan banjir merupakan kondisi alam yang selalu berubah di setiap tahunnya, perlu adanya dukungan pemerintah setempat dalam melakukan kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya bencana alam, seperti banjir dan fenomena alam lainnya.

Sedangkan banjir di Kabupaten Melawi, kondisi bencana alam yang dihadapi sebelumnya masih belum maksimal dengan baik dalam penanganannya. Namun kondisi keuangan pada tahun 2024 sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Melawi telah menyusun rencana kerja dan anggaran untuk program penanggulangan bencana yang terbagi menjadi kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana pada kabupaten/kota, kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dan kegiatan koordinasi penanganan pascabencana pada Kabupaten/Kota. Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 4. RKA Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Belanja Operasional	Belanja Modal	Total	Tahun +1
145.362.700	39.500.000	184.862.700	213.200.000

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Tabel 4 menunjukan bahwa belanja yang sudah terserap dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. BPBD Kabupaten Melawi sudah menggunakan dana penanggulangan bencana dengan sebaik mungkin, namun mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya dikarenakan jumlah anggaran yang sangat terbatas. Hal ini membuat BPBD Kabupaten Melawi sangat berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran agar anggaran yang digunakan dapat terserap secara efektif.

Selain keterbatasan dana, hal yang menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Melawi dalam menanggulangi bencana adalah mobilitas yang terkendala karena akses jalan yang sulit. Beberapa kejadian mengharuskan menempuh jalur air untuk menjangkau daerah yang terdampak banjir. Selain akses yang menghambat mobilitas, kurangnya sarana prasarana juga menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan tanggap darurat ketika banjir. Seperti kurangnya perahu karet, perahu mesin dan lainnya. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi di masa mendatang, BPBD Kab. Melawi sudah memiliki tambahan perahu karet tak bermesin dan bermesin untuk menghadapi bencana banjir dimasa mendatang. Dengan hadirnya tambahan sarana dan prasarana maka bencana yang akan datang dapat ditangani secara efektif.

Tabel 5. RKA Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Belanja Operasional	Belanja Modal	Total	Tahun +1
170.192.700	39.500.000	209.662.700	223.300.000

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Tabel 5 menunjukan bahwa belanja ketersediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota. Kondisi ini dilakukan ketika sudah berada pada tahap darurat bencana maka BNPB akan memberikan bantuan kepada BPBD Kabupaten Melawi berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk membantu menangani bencana. Bantuan juga datang dari pihak luar seperti PT dan CV. Bantuan yang masuk berupa bantuan logistik yang membantu kegiatan operasional dan mobilitas maupun bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tabel 6. RKA Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Belanja Operasional	Belanja Modal	Total	Tahun +1
138.514.969	39.500.000	178.014.969	220.500.000

Sumber: Observasi di BPBD (2023)

Kondisi dana penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Melawi di tahun 2024 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dampak positif kepada BPBD Kabupaten Melawi untuk menjalankan program peanggulangan bencananya secara menyeluruh dari tahap prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Diharapkan penanggulangan bencana di tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain dana yang sudah cukup baik di 2024, BPBD Kabupaten Melawi juga sudah memiliki tambahan perahu karet bermesin dan tak bermesin untuk menghadapi bencana banjir yang mungkin terjadi di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan bencana alam yang dilakukan BPBD Kabupaten Melawi sudah berjalan. Namun, pada optimalannya sangat penting untuk didorong karena bencana alam, banjir dan longsor menjadi permasalahan urgensi yang dihadapi masyarakat. Sinergitas banyak elemen perlu saling berkelaborasi dalam memaksimalkan kinerja penanganan bencana alam. Disamping, bertujuan anggaran yang ada dapat terserap dengan

baik dan menyelesaikan permasalahan bencana jauh lebih banyak. Ditambah bencana yang terjadi selama 2023 didominasi banjir dan kebakaran terutama banjir. Kabupaten Melawi cukup sering mengalami banjir, hal utama yang menjadi penyebab terjadinya banjir adalah curah hujan yang tinggi disertai lemahnya daerah serapan air yang disebabkan hutan gundul ataupun hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit.

Diharapkan kedepannya BPBD Kabupaten Melawi dapat menjalankan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga hutan agar dapat mencegah terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor. Kegiatan ini sempat terhenti di 2023 karena keterbatasan dana yang dimiliki BPBD Kabupaten Melawi. Selain itu, diharapkan juga di tahun 2024 BPBD Kabupaten Melawi dapat mengembangkan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota karena program ini juga terhambat di tahun 2023 karena keterbatasan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aini, N., Esterilita, M., & Rochman, U. H. (2024). Implementasi Layanan Dukungan Psikososial Melalui Terapi Bermain dan Phbs Terhadap Anak Pasca Bencana Erupsi Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. *J. Abdimas: Community Health*, 5(1), 25–35.
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2019). Catastrophe Bond Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 339–349.
- Arisandy, C. J., Dadang, D., & Deksino, G. R. (2024). Strategi Komando Resor Militer 061/Suryakencana Dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir Di Wilayah Kota Bogor Guna Mendukung Pertahanan Darat. *Strategi Dan Kampanye Militer (SKM)*, 10(1), 88–115.
- Dianty, J. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 10(4).
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39.
- Harijoko, A., Puspitasari, D., Prabaningrum, I., Prastika, K. P., & Wijayanti, N. F. (2021). Manajemen penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia. UGM PRESS.
- Hermon, D. (2015). Geografi bencana alam. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Lasaiba, M. A. (2024). Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Metropolitan: Dampak Urbanisasi dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 17(2), 213–227.
- Laveda, A. T., Ningsih, S., & Setyawati, K. (2024). Pendekatan Community Based Disaster Management (CBDM) Melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Jatibening. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 25–34.
- Leiwakabessy, T. F. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem

- Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah The Effect Of Government Internal Control System, Human Resource Competency, And Accountin. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 214–224.
- Muryanti, M., & Rokhiman, R. (2017). Bambi Ari'sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Dalam Penanganan Bencana Kabut Asap Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 21–39.
- Natasya, M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Barang Harian Di Kecamatan Rupat. *Universitas Islam Riau*.
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 334–350.
- Octavianti, M., & Watrin, M. S. (2020). Pembentukkan generasi tangguh bencana sebagai antisipasi risiko gempa “sesar lembang. Adaptasi Dan Mitigasi Bencana, 97.
- Paripurno, E. T. (2018). Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok.
- Pelleng, B., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Industrial di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 260–270.
- Pudjiastuti, S. R. (2019). Mengantisipasi dampak bencana alam. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)* STKIP Kusuma Negara, 10(2), 1–14.
- Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *JOURNAL ASRO*, 6, 1–22.
- PUTRI, F. T. B. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pt X Pada Tahun 2019 Dan 2020 Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Common Size Dan Analisis Trend.
- Rijanta, R., Hizbaron, D. R., & Baiquni, M. (2018). Modal sosial dalam manajemen bencana. UGM PRESS.
- Rivani, E. (2019). Mekanisme, Jenis Pendanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana Di Daerah (Mechanism, Type Of Funding, And Accountability Of Disaster Management Funds In Region). *Kajian*, 22(1), 59–70.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 66–81.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan asap kabut akibat kebakaran hutan di wilayah perbatasan Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 59–75.
- Taufiq, A. B. D. R., & Silaturahmi, G. (2022). Akuntansi Lingkungan Dan Sosial (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia). UNIPMA Press.
- Ulum, M. C. (2014). Manajemen bencana: Suatu pengantar pendekatan proaktif. Universitas Brawijaya Press